



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-ITJEN 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PETA KINERJA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Unit Kerja Eselon I wajib untuk menyusun Perjanjian Kinerja;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Unit Kerja Eselon I perlu menetapkan Struktur dan Peta Kinerja yang berlaku sebagai acuan pada masing-masing lingkungan Unit Kerja Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Penetapan Struktur dan Peta Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PETA KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Menetapkan Struktur dan Peta Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Jenderal ini.
- KEDUA : Struktur dan Peta Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal wajib menjadi acuan yang digunakan seluruh Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menyusun dokumen kinerja tahunan.
- KETIGA : Struktur dan Peta Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan meliputi:
- a. Indikator Kinerja
Merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Struktur Muatan
Merupakan penjabaran kinerja Inspektorat Jenderal atas Visi Kementerian Perhubungan melalui Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal;
 - c. Peta Strategi
Merupakan rancangan matrik kinerja yang mengklasifikasi Sasaran Program dan Kegiatan melalui empat perspektif dengan menerapkan metode *Balanced Scorecard*;
 - d. Rumusan Indikator dan Target Kinerja Program
Merupakan penjabaran dari Sasaran Program dengan informasi meliputi Meta Indikator, Rumusan Perhitungan, Satuan, *Baseline*, dan Target capaian kinerja level Program untuk lima tahun;
 - e. Rumusan Indikator dan Target Kinerja Kegiatan
Merupakan penjabaran dari Sasaran Kegiatan dengan informasi meliputi Meta Indikator, Rumusan Perhitungan, Satuan, *Baseline*, dan Target capaian kinerja level kegiatan untuk lima tahun;
 - f. Pohon Kinerja
Merupakan penjenjangan dan penjabaran kinerja beserta indikatornya sebagai upaya menjamin keselarasan kerangka kinerja dari level Sasaran Strategis terhadap Sasaran Program dan Kegiatan;
 - g. Matrik Peran Bagi Hasil Antar Unit
Merupakan tabel yang menunjukkan peran dan penanggung jawab unit lingkup Inspektorat Jenderal terhadap indikator yang ada di Sasaran Program dan Kegiatan;
 - h. Piramida ...

h. Piramida Kinerja

Merupakan model yang mengilustrasikan hirarki kinerja terhadap Sasaran Program dan Kegiatan ke dalam kelompok *Outcome*, *Output* Kendali Rendah, *Output* Kendali Sedang, dan *Output* Kendali Tinggi dari level organisasi sampai dengan level individu.

- KEEMPAT : Penetapan Perjanjian Kinerja setiap tahunnya wajib berdasarkan Struktur dan Peta Kinerja sebagaimana DIKTUM KETIGA.
- KELIMA : Struktur dan Peta Kinerja wajib menjadi pedoman dalam penyusunan Indikator Kinerja Individu.
- KEENAM : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2025

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA

SALINAN Keputusan Inspektur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan
3. Para Inspektur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PETA KINERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029
NOMOR : KP-ITJEN 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 JANUARI 2025

STRUKTUR DAN PETA KINERJA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029

STRUKTUR DAN PETA KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

A. INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | META INDIKATOR |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|--------|---|
| STAKEHOLDER PERSPECTIVE | | | | | |
| SP 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan | IKP 1.1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan | Opini | Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang dikeluarkan oleh BPK |
| | | IKP 1.2 | Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | Persen | $\frac{\sum \text{Unit Kerja Penerima WBK/WBBM Selama 3 Tahun}}{\sum \text{Unit Kerja yang Diusulkan Selama 3 Tahun}} \times 100\%$ |
| | | IKP 1.3 | Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Telah Diselesaikan | Persen | $\frac{\sum \text{Pengaduan Diselesaikan}}{\sum \text{Pengaduan Masuk}} \times 100\%$ |
| | | IKP 1.4 | Indeks Survei Penilaian Integritas Kementerian Perhubungan | Indeks | Indeks Integritas pada Rapor SPI Kementerian Perhubungan |
| | | IKP 1.5 | Persentase Deviasi Hasil Penjaminan Kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dengan Hasil Evaluasi BPKP | Persen | $\frac{(\text{Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen} - \text{Hasil Evaluasi BPKP})}{\text{Hasil Evaluasi BPKP}} \times 100\%$ |
| CUSTOMER PERSPECTIVE | | | | | |

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | SATUAN | META INDIKATOR |
|-----------------|--|---------------------------|---|--------|---|
| SP 2 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan | IKP 2.1 | Skor Kapabilitas APIP (IACM) | Skor | $\sum (Skor\ Elemen\ pada\ Komponen\ Dukungan\ Pengawasan + Skor\ Elemen\ pada\ Komponen\ Aktivitas\ dan\ Kualita\ Pengawasan)$ |
| | | IKP 2.2 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Jenderal | Persen | $\frac{\sum (Aspek\ (Profesional + Integritas + Amanah))}{3} \times 100\%$ $Aspek\ Profesional = \frac{\sum Bobot\ Pertanyaan\ Profesional}{\sum Responden}$ $Aspek\ Integritas = \frac{\sum Bobot\ Pertanyaan\ Integritas}{\sum Responden}$ $Aspek\ Amanah = \frac{\sum Bobot\ Pertanyaan\ Amanah}{\sum Responden}$ <p>Bobot : Sangat Puas : 4 Puas : 3 Tidak Puas : 2 Sangat Tidak Puas : 1</p> |

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--------|---|
| INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE | | | | | |
| SK 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | IKK 1.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat I | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 1.2 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat I | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat I}}{3} \times 100\%$ |
| SK 2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | IKK 2.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat II | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 2.2 | Persentase Nilai SAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Persen | $\frac{\sum \text{Nilai SAKIP Eselon I}}{\sum \text{Eselon I}} \times 100\%$ |
| | | IKK 2.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat II | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat II}}{3} \times 100\%$ |
| SK 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | IKK 3.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat III | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 3.2 | Persentase Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN | Persen | $\frac{a + b}{2}$ $a = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan } m^2}{\text{Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan } m^2} \times 100\%$ $b = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}}{\text{Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}} \times 100\%$ |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------------------------|--|--------|--|
| | | IKK 3.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat III | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat III}}{3} \times 100\%$ |
| SK 4 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | IKK 4.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat IV | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 4.2 | Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA | Persen | $\frac{\sum \text{Nilai Anggaran Terkoreksi atas Seluruh Permasalahan}}{\sum \text{Anggaran yang Direviu}} \times 100\%$ |
| | | IKK 4.3 | Persentase Hasil Peer Review (Telaah Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan kategori Baik | Persen | $\frac{\sum \text{Inspektorat yang Memperoleh Nilai Hasil Telaahan Sejawat dengan Kategori Baik}}{\sum \text{Inspektorat yang Telah Ditelaah}} \times 100\%$ |
| | | IKK 4.4 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat IV | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat IV}}{3} \times 100\%$ |
| SK 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Investigasi | IKK 5.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat Investigasi | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{3}$ |
| | | IKK 5.2 | Persentase Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti | Persen | $\frac{\sum \text{Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Temuan ADTT}} \times 100\%$ |
| | | IKK 5.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Investigasi | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat Investigasi (ADTT Terprogram)}}{3} \times 100\%$ |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan | IKK 6.1 | Persentase Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan | Persen | $\frac{\sum \text{SOR tanpa Paragraf Penjelas}}{\sum \text{SOR}} \times 100\%$ |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|----------------------------|---|--------|---|
| | IKK 6.2 | Persentase Anggaran Sampling yang Dilakukan Reviu PIPK | Persen | $\frac{\text{Nilai Akun Signifikan yang Dilakukan Sampling Tahun (N)}}{\text{Total Saldo Akun Signifikan Kementerian Perhubungan yang Disepakati (Audited/Unaudited) Tahun Sebelumnya (N - 1)}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.3 | Persentase Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Mencapai Level 3 pada PK SPIP | Persen | $\frac{\sum \text{Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas}}{\sum \text{Satker yang Dilakukan Penilaian Mandiri}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.4 | Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan | Persen | $\frac{\sum \text{Pengaduan Diselesaikan}}{\sum \text{Pengaduan Masuk}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.5 | Persentase Unit Kerja dengan Maturitas Manajemen Risiko Level 3 | Persen | $\frac{\sum \text{Unit Kerja dengan Nilai Manajemen Risiko Mencapai Level 3}}{\sum \text{Unit Kerja yang Dilakukan Penilaian Manajemen Risiko}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.6 | Persentase Usulan Unit Kerja untuk Pembangunan Zona Integritas yang Dilakukan Penjaminan Kualitas | Persen | $\frac{\sum \text{Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas}}{\sum \text{Satker Kementerian Perhubungan yang Diusulkan Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.7 | Persentase Pelaporan Non LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Persen | $\frac{\sum \text{Wajib Lapo Non LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga}}{\sum \text{Wajib Lapo Non LHKPN Kementerian Perhubungan}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.8 | Persentase Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan | Persen | $\frac{\sum \text{Program Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Program Evaluasi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.9 | Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti | Persen | $\frac{\text{Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\%$ <p>Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti = Temuan Status Tuntas + Temuan Status Proses + Temuan Status TDTL</p> |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------------------------|--|--------|--|
| | | IKK 6.10 | Persentase Tindak Lanjut LHP BPK yang Sesuai Rekomendasi | Persen | $\frac{\sum \text{Rekomendasi dengan Status "Sesuai Rekomendasi"}}{\sum \text{Rekomendasi}} \times 100\%$ |
| | | IKK 6.11 | Persentase Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Pendampingan Stranas PK | Persen | $\frac{\sum \text{Pelaporan Aksi Stranas PK}}{4} \times 50\%$ + $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Uji Petik}}{4} \times 50\%$ |
| | | IKK 6.12 | Persentase Pengisian Survei Penilaian Integritas oleh Responden | Persen | $\frac{\sum \text{Perolehan Respon}}{\sum \text{Data Blast Terkirim}} \times 100\%$ |

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

| | | | | | |
|------|--|---------|---|--------|--|
| SK 7 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan | IKK 7.1 | Skor Penilaian Mandiri Dukungan Pengawasan IACM | Skor | $\frac{\sum \text{Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan}}{60\%}$ |
| | | IKK 7.2 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal | Nilai | Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tingkat II |
| | | IKK 7.3 | Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit | Nilai | $\sum \text{Nilai Aspek Penilaian Sistem Merit}$ |
| | | IKK 7.4 | Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Inspektorat Jenderal | Persen | $\frac{\sum \text{Wajib Lapo LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga}}{\sum \text{Wajib Lapo LHKPN Inspektorat Jenderal}} \times 100\%$ |
| | | IKK 7.5 | Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | $\sum \text{Nilai Dimensi Indeks Profesionalitas ASN}$ |
| | | IKK 7.6 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | $\sum ((\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) \times \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai Indikator Dispensasi SPM}$ |
| | | IKK 7.7 | Nilai Indeks Pengelolaan Aset | Nilai | $\sum \text{Nilai Indeks Pengelolaan Aset}$ |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------------------------|---|--------|--|
| | | | | | $\text{Nilai Indeks Pengelolaan Aset} = \text{Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Terkait BMN pada K/L} \times 0,2 + \text{Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN} \times 0,6 + \text{Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN} \times 0,4 + \text{Asuransi BMN} \times 0,6 + \text{Tindak Lanjut Pengelolaan BMN} \times 0,6 + \text{Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN} \times 0,6 + \text{Persentase BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan} \times 0,6 + \text{Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan} \times 0,4$ |
| | | IKK 7.8 | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai | $\text{Capaian RO} \times 75\% + \text{Penggunaan SBK} \times 10\% + \text{Efisiensi SBK} \times 15\%$ |
| | | IKK 7.9 | Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal | Nilai | $\text{Nilai SAKIP} \times 25 + \text{Nilai TL AoI SPIP} \times 25 + \text{Maturitas MR} \times 25 + \text{Realisasi PKPT} \times 25$ $\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Itjen}}{\text{Nilai Maksimal SAKIP}}$ $\text{Nilai TL AoI SPIP} = \frac{\sum \text{AoI yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{AoI}}$ $\text{Maturitas MR} = \frac{\text{Level Maturitas MR Itjen}}{\text{Level Maksimal Maturitas MR}}$ $\text{Realisasi PKPT} = \frac{\sum \text{Unit Kerja yang Diaudit}}{\sum \text{Unit Kerja yang Direncanakan}}$ |
| | | IKK 7.10 | Persentase Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan | Persen | $\frac{\sum \text{Realisasi Pemeliharaan Sistem}}{\sum \text{Item Kebutuhan Pemeliharaan Hasil Evaluasi atau Identifikasi TIK}} \times 100\%$ |
| | | IKK 7.11 | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan | Persen | $\frac{\text{Persentase Audit Menggunakan Siau} + \text{Persentase Reviu Menggunakan Siau}}{2}$ |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|----------------------------|---|----------|--|
| | | | | <p><i>Persentase Audit Menggunakan Siau</i></p> $= \frac{\sum \text{Realisasi Audit Kinerja Menggunakan Siau}}{\sum \text{ST Audit Kinerja}} \times 100\%$ <p><i>Persentase Reviu Menggunakan Siau</i></p> $= \frac{\sum \text{Realisasi Reviu Menggunakan Siau}}{\sum \text{ST Reviu}} \times 100\%$ <p>Kegiatan Reviu terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Reviu RKBMN 4. Reviu HPS 5. Reviu Revisi DIPA |
| | IKK 7.12 | Presentase Kerjasama yang Dilaksanakan | Persen | $\frac{\sum \text{Kerja sama yang Dilakukan}}{\sum \text{Rencana Kerja sama}} \times 100\%$ |
| | IKK 7.13 | Presentase Pedoman Pengawasan yang Ditetapkan | Persen | $\frac{\sum \text{Pedoman Prioritas yang Ditetapkan}}{\sum \text{Program Penetapan Pedoman Prioritas}} \times 100\%$ |
| | IKK 7.14 | Persentase Pemahaman Publik Positif terhadap Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal | Persen | $\frac{\sum \text{Konten Sosian Media dengan Pemahaman Publik Positif}}{\sum \text{Konten Sosial Media}} \times 100\%$ |
| | IKK 7.15 | Kualitas Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan | Kualitas | $\frac{DS + TR + KW}{3}$ <p><i>Desain Survei (DS)</i></p> $= \frac{\sum \text{Pertanyaan Relevan}}{\sum \text{Pertanyaan}} \times 100\%$ <p><i>Tingkat Respons (TR)</i></p> $= \frac{\sum \text{Responden yang Mengisi Kuesioner}}{\sum \text{Target Responden}} \times 100\%$ <p><i>Ketepatan Waktu (KW)</i></p> $= \frac{\sum \text{Responden Tepat Waktu}}{\sum \text{Responden yang Mengisi Kuesioner}} \times 100\%$ |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | Predikat Kualitas: 81-100% = Sangat Baik 61-80% = Baik 41-60% = Cukup 21-40% = Kurang 0-20% = Sangat Kurang |

3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--------|---|
| INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE | | | | | |
| SK 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | IKK 1.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat I | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 1.2 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat I | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat I}}{3} \times 100\%$ |
| SK 2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | IKK 2.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat II | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 2.2 | Persentase Nilai SAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Persen | $\frac{\sum \text{Nilai SAKIP Eselon I}}{\sum \text{Eselon I}} \times 100\%$ |
| | | IKK 2.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat II | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat II}}{3} \times 100\%$ |
| SK 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | IKK 3.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat III | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 3.2 | Persentase Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN | Persen | $\frac{a + b}{2}$ $a = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan } m^2}{\text{Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan } m^2} \times 100\%$ $b = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}}{\text{Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}} \times 100\%$ |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------------------------|--|--------|--|
| | | IKK 3.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat III | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat III}}{3} \times 100\%$ |
| SK 4 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | IKK 4.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat IV | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{4}$ |
| | | IKK 4.2 | Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA | Persen | $\frac{\sum \text{Nilai Anggaran Terkoreksi atas Seluruh Permasalahan}}{\sum \text{Anggaran yang Direviu}} \times 100\%$ |
| | | IKK 4.3 | Persentase Hasil Peer Review (Telaah Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan kategori Baik | Persen | $\frac{\sum \text{Inspektorat yang Memperoleh Nilai Hasil Telaahan Sejawat dengan Kategori Baik}}{\sum \text{Inspektorat yang Telah Ditelaah}} \times 100\%$ |
| | | IKK 4.4 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat IV | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat IV}}{3} \times 100\%$ |
| SK 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Investigasi | IKK 5.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat Investigasi | Skor | $\frac{(\text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Asurans atas GRC} + \text{Skor Topik Jasa Konsultansi})}{3}$ |
| | | IKK 5.2 | Persentase Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti | Persen | $\frac{\sum \text{Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Temuan ADTT}} \times 100\%$ |
| | | IKK 5.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Investigasi | Persen | $\frac{\sum \text{Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) Responden Auditi Inspektorat Investigasi (ADTT Terprogram)}}{3} \times 100\%$ |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan | IKK 6.1 | Persentase Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan | Persen | $\frac{\sum \text{SOR tanpa Paragraf Penjelas}}{\sum \text{SOR}} \times 100\%$ |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|----------------------------|---|--------|---|
| | IKK 6.2 | Persentase Anggaran Sampling yang Dilakukan Reviu PIPK | Persen | $\frac{\text{Nilai Akun Signifikan yang Dilakukan Sampling Tahun (N)}}{\text{Total Saldo Akun Signifikan Kementerian Perhubungan yang Disepakati (Audited/Unaudited) Tahun Sebelumnya (N - 1)}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.3 | Persentase Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Mencapai Level 3 pada PK SPIP | Persen | $\frac{\sum \text{Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas}}{\sum \text{Satker yang Dilakukan Penilaian Mandiri}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.4 | Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan | Persen | $\frac{\sum \text{Pengaduan Diselesaikan}}{\sum \text{Pengaduan Masuk}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.5 | Persentase Unit Kerja dengan Maturitas Manajemen Risiko Level 3 | Persen | $\frac{\sum \text{Unit Kerja dengan Nilai Manajemen Risiko Mencapai Level 3}}{\sum \text{Unit Kerja yang Dilakukan Penilaian Manajemen Risiko}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.6 | Persentase Usulan Unit Kerja untuk Pembangunan Zona Integritas yang Dilakukan Penjaminan Kualitas | Persen | $\frac{\sum \text{Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas}}{\sum \text{Satker Kementerian Perhubungan yang Diusulkan Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.7 | Persentase Pelaporan Non LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Persen | $\frac{\sum \text{Wajib Lapo Non LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga}}{\sum \text{Wajib Lapo Non LHKPN Kementerian Perhubungan}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.8 | Persentase Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan | Persen | $\frac{\sum \text{Program Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Program Evaluasi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$ |
| | IKK 6.9 | Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti | Persen | $\frac{\text{Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\%$ <p>Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti = Temuan Status Tuntas + Temuan Status Proses + Temuan Status TDTL</p> |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------------------------|--|--------|--|
| | | IKK 6.10 | Persentase Tindak Lanjut LHP BPK yang Sesuai Rekomendasi | Persen | $\frac{\sum \text{Rekomendasi dengan Status "Sesuai Rekomendasi"}}{\sum \text{Rekomendasi}} \times 100\%$ |
| | | IKK 6.11 | Persentase Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Pendampingan Stranas PK | Persen | $\frac{\sum \text{Pelaporan Aksi Stranas PK}}{4} \times 50\%$ + $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Uji Petik}}{4} \times 50\%$ |
| | | IKK 6.12 | Persentase Pengisian Survei Penilaian Integritas oleh Responden | Persen | $\frac{\sum \text{Perolehan Respon}}{\sum \text{Data Blast Terkirim}} \times 100\%$ |

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

| | | | | | |
|------|--|---------|---|--------|--|
| SK 7 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan | IKK 7.1 | Skor Penilaian Mandiri Dukungan Pengawasan IACM | Skor | $\frac{\sum \text{Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan}}{60\%}$ |
| | | IKK 7.2 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal | Nilai | Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tingkat II |
| | | IKK 7.3 | Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit | Nilai | $\sum \text{Nilai Aspek Penilaian Sistem Merit}$ |
| | | IKK 7.4 | Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Inspektorat Jenderal | Persen | $\frac{\sum \text{Wajib Lapo LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga}}{\sum \text{Wajib Lapo LHKPN Inspektorat Jenderal}} \times 100\%$ |
| | | IKK 7.5 | Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | $\sum \text{Nilai Dimensi Indeks Profesionalitas ASN}$ |
| | | IKK 7.6 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | $\sum ((\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) \times \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai Indikator Dispensasi SPM}$ |
| | | IKK 7.7 | Nilai Indeks Pengelolaan Aset | Nilai | $\sum \text{Nilai Indeks Pengelolaan Aset}$ |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------------------------|---|--------|--|
| | | | | | $\text{Nilai Indeks Pengelolaan Aset} = \text{Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Terkait BMN pada K/L} \times 0,2 + \text{Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN} \times 0,6 + \text{Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN} \times 0,4 + \text{Asuransi BMN} \times 0,6 + \text{Tindak Lanjut Pengelolaan BMN} \times 0,6 + \text{Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN} \times 0,6 + \text{Persentase BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan} \times 0,6 + \text{Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan} \times 0,4$ |
| | | IKK 7.8 | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai | $\text{Capaian RO} \times 75\% + \text{Penggunaan SBK} \times 10\% + \text{Efisiensi SBK} \times 15\%$ |
| | | IKK 7.9 | Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal | Nilai | $\text{Nilai SAKIP} \times 25 + \text{Nilai TL AoI SPIP} \times 25 + \text{Maturitas MR} \times 25 + \text{Realisasi PKPT} \times 25$ $\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Itjen}}{\text{Nilai Maksimal SAKIP}}$ $\text{Nilai TL AoI SPIP} = \frac{\sum \text{AoI yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{AoI}}$ $\text{Maturitas MR} = \frac{\text{Level Maturitas MR Itjen}}{\text{Level Maksimal Maturitas MR}}$ $\text{Realisasi PKPT} = \frac{\sum \text{Unit Kerja yang Diaudit}}{\sum \text{Unit Kerja yang Direncanakan}}$ |
| | | IKK 7.10 | Persentase Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan | Persen | $\frac{\sum \text{Realisasi Pemeliharaan Sistem Item Kebutuhan}}{\sum \text{Pemeliharaan Hasil Evaluasi atau Identifikasi TIK}} \times 100\%$ |
| | | IKK 7.11 | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan | Persen | $\frac{\text{Persentase Audit Menggunakan Siau} + \text{Persentase Reviu Menggunakan Siau}}{2}$ |

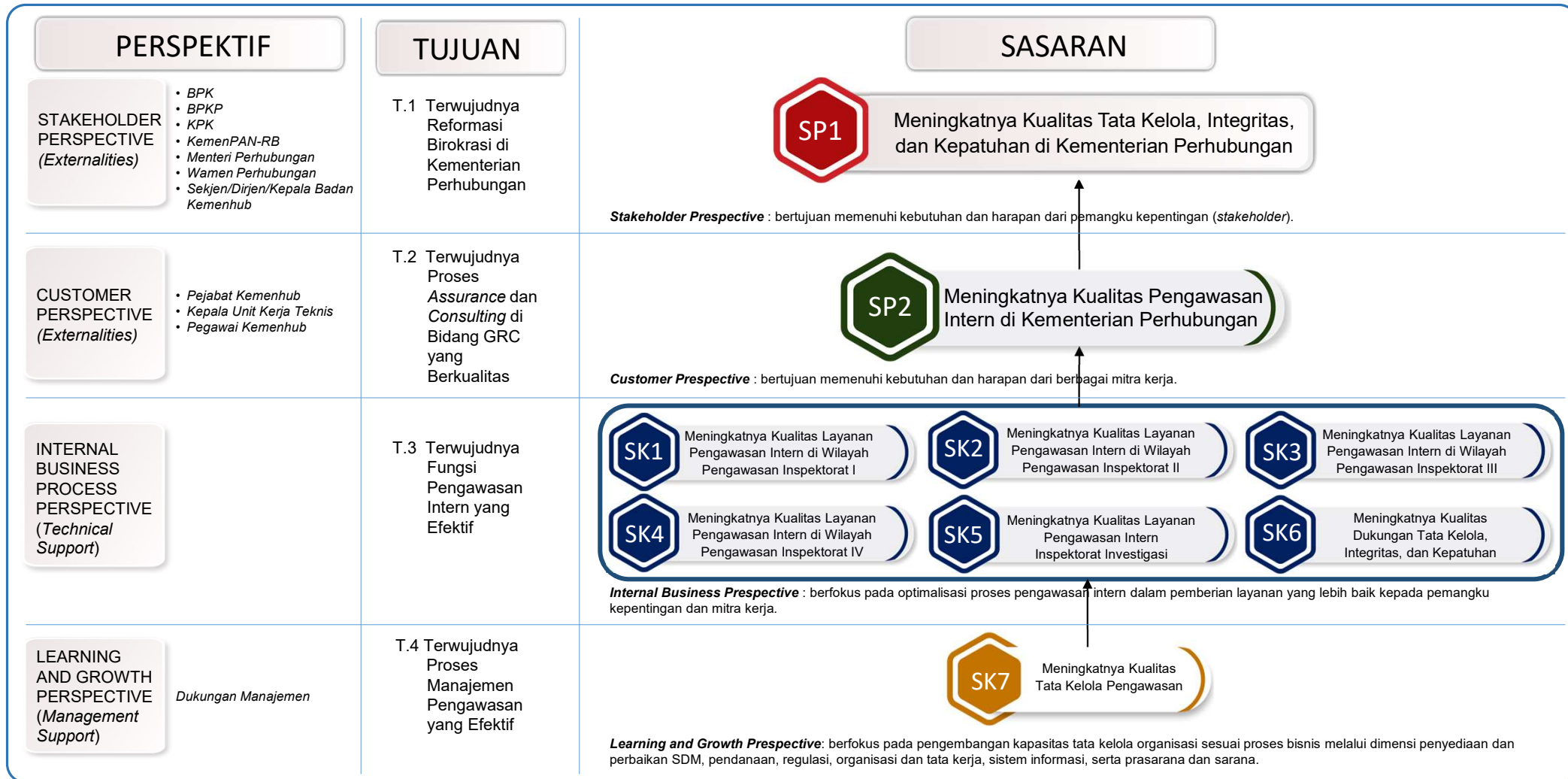
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | META INDIKATOR |
|------------------|--|----------|--|
| | | | <p><i>Persentase Audit Menggunakan Siau</i></p> $= \frac{\sum \text{Realisasi Audit Kinerja Menggunakan Siau}}{\sum \text{ST Audit Kinerja}} \times 100\%$ <p><i>Persentase Reviu Menggunakan Siau</i></p> $= \frac{\sum \text{Realisasi Reviu Menggunakan Siau}}{\sum \text{ST Reviu}} \times 100\%$ <p>Kegiatan Reviu terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Reviu RKBMN 4. Reviu HPS 5. Reviu Revisi DIPA |
| | IKK 7.12 Presentase Kerjasama yang Dilaksanakan | Persen | $\frac{\sum \text{Kerja sama yang Dilakukan}}{\sum \text{Rencana Kerja sama}} \times 100\%$ |
| | IKK 7.13 Presentase Pedoman Pengawasan yang Ditetapkan | Persen | $\frac{\sum \text{Pedoman Prioritas yang Ditetapkan}}{\sum \text{Program Penetapan Pedoman Prioritas}} \times 100\%$ |
| | IKK 7.14 Persentase Pemahaman Publik Positif terhadap Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal | Persen | $\frac{\sum \text{Konten Sosian Media dengan Pemahaman Publik Positif}}{\sum \text{Konten Sosial Media}} \times 100\%$ |
| | IKK 7.15 Kualitas Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan | Kualitas | $\frac{DS + TR + KW}{3}$ <p><i>Desain Survei (DS)</i></p> $= \frac{\sum \text{Pertanyaan Relevan}}{\sum \text{Pertanyaan}} \times 100\%$ <p><i>Tingkat Respons (TR)</i></p> $= \frac{\sum \text{Responden yang Mengisi Kuesioner}}{\sum \text{Target Responden}} \times 100\%$ <p><i>Ketepatan Waktu (KW)</i></p> $= \frac{\sum \text{Responden Tepat Waktu}}{\sum \text{Responden yang Mengisi Kuesioner}} \times 100\%$ |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | SATUAN | META INDIKATOR |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | Predikat Kualitas: 81-100% = Sangat Baik 61-80% = Baik 41-60% = Cukup 21-40% = Kurang 0-20% = Sangat Kurang |

B. STRUKTUR MUATAN RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Visi Kemenhub 2025-2029 | Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | | | | | | | | | |
| Visi Itjen 2025-2029 | Mengawal Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | | | | | | | | | |
| Misi Itjen 2025-2029 | M.1 Mendukung Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Perhubungan | M.2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern | | | | | | | | |
| Tujuan Itjen 2025-2029 | T1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan | T2 Terwujudnya Proses <i>Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Bidang GRC yang Berkualitas | T3 Terwujudnya Fungsi Pengawasan Intern yang Efektif | | | | | | T4 Terwujudnya Proses Manajemen Pengawasan yang Efektif | |
| Sasaran Itjen 2025-2029 | SP 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan | SP 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan | SK 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | SK 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | SK 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | SK 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | SK 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Investigasi | SK 6 Meningkatnya Kualitas Dukungan Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan | SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan | |

C. PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029



D. RUMUSAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029

| SASARAN PROGRAM (SP) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | META INDIKATOR | RUMUSAN PERHITUNGAN | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SP 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan | IKP 1.1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan | Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang dikeluarkan oleh BPK | Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang Dikeluarkan oleh BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | IKP 1.2 | Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | Rata-rata tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dalam tiga tahun terakhir (Disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024) | \sum Unit Kerja Penerima WBK/WBBM Selama 3 Tahun (N-2+N-1+N) / \sum Unit Kerja yang Diusulkan Selama 3 Tahun (N-2+N-1+N) x 100% | Persen | 8.7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | IKP 1.3 | Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Telah Diselesaikan | Hasil penilaian oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atas tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | $(\sum$ Pengaduan Diselesaikan / \sum Pengaduan Masuk) x 100% | Persen | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| | IKP 1.4 | Indeks Survei Penilaian Integritas Kementerian Perhubungan | Indeks Integritas oleh KPK yang menggabungkan penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli serta faktor koreksi | Indeks Integritas pada Rapor SPI Kementerian Perhubungan | Indeks | 73.49 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| | IKP 1.5 | Persentase Deviasi Hasil Penjaminan Kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dengan Hasil Evaluasi BPKP | Persentase Tingkat Kesenjangan antara Hasil Pejaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil Evaluasi BPKP semakin mengecil | (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Ijen-Hasil Evaluasi BPKP)/Hasil Evaluasi BPKP * 100% | Persen | - | 15 | 13 | 12 | 11 | 5 |
| SP 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan | IKP 2.1 | Skor Kapabilitas APIP (ACM) | Hasil Evaluasi BPKP pada Level Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) | \sum (Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Elemen pada Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan) | Skor | 3.30 | 3.42 | 3.55 | 3.67 | 3.81 | 4 |
| | IKP 2.2 | Persentase Kepuasan Audit terhadap Pengawasan Inspektorat Jenderal | Jumlah rata - rata dari aspek profesional, aspek integritas, dan aspek amanah berdasarkan hasil survei | \sum Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) /3 x 100% Aspek Profesional = \sum Bobot Pertanyaan Profesional / \sum Responden Aspek Integritas = \sum Bobot Pertanyaan Integritas / \sum Responden Aspek Amanah = \sum Bobot Pertanyaan Amanah / \sum Responden Bobot : Sangat Puas : 4 Puas : 3 Tidak Puas : 2 Sangat Tidak Puas : 1 | Persen | 89.13 | 90.26 | 90.36 | 90.46 | 90.56 | 90.66 |

E. RUMUSAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029

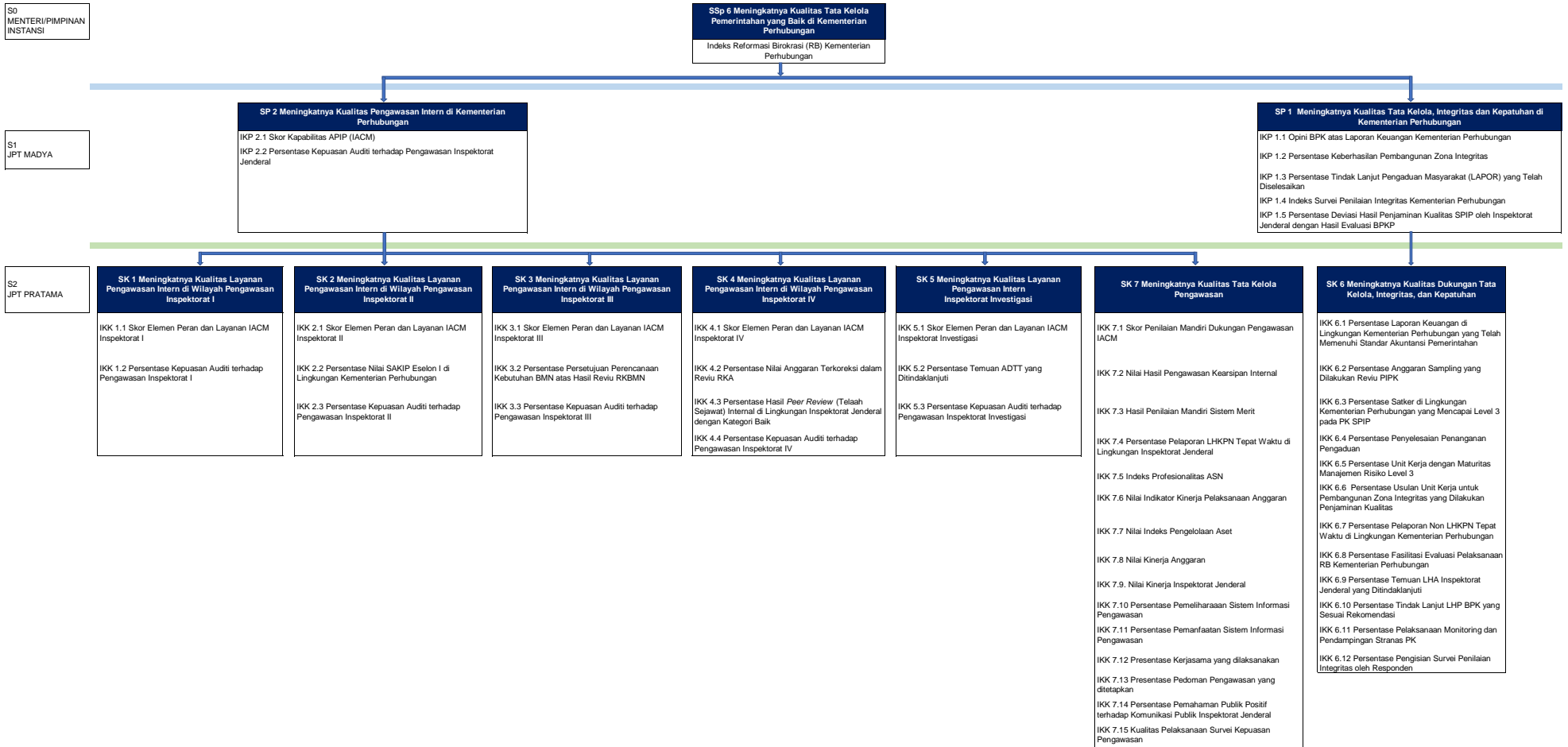
| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | META INDIKATOR | RUMUSAN PERHITUNGAN | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | | | | |
| SK 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | IKK 1.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat I | Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat I berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services) | (Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asuransi atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4 | Skor | 3 | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 |
| | IKK 1.2 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat I | Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat I | \sum Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat I / 3 x 100% | Persen | 87.81 | 88.06 | 88.31 | 88.56 | 88.81 | 89.06 |
| SK 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | IKK 2.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat II | Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat II berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services) | (Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asuransi atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4 | Skor | 3 | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 |
| | IKK 2.2 | Persentase Nilai SAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Presentase rata-rata nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perhubungan | \sum Nilai SAKIP Eselon I / \sum Eselon I x 100 | Persen | 80.47 | 80.50 | 80.55 | 80.60 | 80.65 | 80.70 |
| | IKK 2.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat II | Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat II | \sum Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat II / 3 x 100% | Persen | 87.48 | 87.50 | 87.65 | 87.80 | 87.95 | 88.10 |
| SK 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | IKK 3.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat III | Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat III berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services) | (Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asuransi atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4 | Skor | 3 | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 |
| | IKK 3.2 | Persentase Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN | Persentase rata-rata persetujuan perencanaan kebutuhan BMN (pemeliharaan, pengadaan, RP3BMN) dibagi usulan perencanaan kebutuhan BMN (pemeliharaan, pengadaan, RP3BMN) dengan satuan m ² dan unit | $(a+b)/2$ a= (Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan m ² /Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan m ²)x100% b= (Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit/Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit)x100% | Persen | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| | IKK 3.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat III | Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat III | \sum Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat III / 3 x 100% | Persen | 90.47 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| SK 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | IKK 4.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat IV | Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat IV berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services) | (Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asuransi atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4 | Skor | 3 | 3 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4 |
| | IKK 4.2 | Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA | Total nilai anggaran terkoreksi atas seluruh permasalahan dibagi total anggaran yang direviu | $(\sum$ Nilai Anggaran Terkoreksi Atas Seluruh Permasalahan / \sum Anggaran yang Direviu) x 100% | Persen | 20.66 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| | IKK 4.3 | Persentase Hasil Peer Review (Telaah Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan kategori Baik | Jumlah Inspektorat yang memperoleh nilai Telaah Sejawat kategori Baik dibagi Inspektorat yang telah ditelaah | $(\sum$ Inspektorat yang Memperoleh Nilai Hasil Telaah Sejawat dengan Kategori Baik / \sum Inspektorat yang Telah Ditelaah) x 100% | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | IKK 4.4 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat IV | Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat IV | \sum Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat IV / 3 x 100% | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| SK 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Investigasi | IKK 5.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat Investigasi | Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services) | (Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asuransi atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 3 | Skor | 3 | 3 | 3 | 3.30 | 3.60 | 4 |
| | IKK 5.2 | Persentase Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti | Temuan ADTT penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti. Kategori ditindaklanjuti, yaitu: Proses dan Tuntas | $(\sum$ Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti / \sum Temuan ADTT) x 100% | Persen | 75.56 | 75.5 | 76 | 76 | 76.5 | 77 |
| | IKK 5.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Investigasi | Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat Investigasi | \sum Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat Investigasi (ADTT Terprogram) / 3 x 100% | Persen | 87.58 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 88 | 88 |
| SK 6 Meningkatnya Kualitas Dukungan Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan | IKK 6.1 | Persentase Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan | Jumlah SOR tanpa paragraf penjelas dibagi jumlah keseluruhan SOR | $(\sum$ SOR Tanpa Paragraf Penjelas / \sum SOR) x 100% | Persen | 69.23 | 70 | 72.50 | 75 | 77.50 | 80 |

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | META INDIKATOR | RUMUSAN PERHITUNGAN | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---------|--|---|---|--------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | IKK 6.2 | Persentase Anggaran Sampling yang Dilakukan Reviu PIPK | Jumlah anggaran sampling Reviu PIPK dibagi total anggaran Kementerian Perhubungan | Nilai Akun Signifikan yang Dilakukan Sampling Tahun (N) / Total Saldo Akun Signifikan Kementerian Perhubungan yang Disepakati (Audited/Unaudited) Tahun Sebelumnya (N-1) x 100% | Persen | - | 20 |
| IKK 6.3 | Persentase Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Mencapai Level 3 pada PK SPIP | Jumlah Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas dibagi dengan jumlah Satker yang dilakukan Penilaian Mandiri | (\sum Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas / \sum Satker yang Dilakukan Penilaian Mandiri) x 100% | Persen | 30.22 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | | |
| IKK 6.4 | Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan | Penyelesaian penanganan pengaduan dihitung melalui rata-rata pengaduan diselesaikan yang bersumber dari 2 kanal yaitu: SIMADU dan SP4N LAPOR. Pengaduan dinyatakan selesai meliputi beberapa status, yaitu: 1. SIMADU: a. Selesai b. Ditolak c. Dimpahkan d. SPAM 2. SP4N LAPOR: a. Terdisposisi sedang diproses b. Terdisposisi selesai c. Laporan arsip Periode perhitungan penanganan pengaduan dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya hingga 30 November tahun berjalan. | (\sum Pengaduan Diselesaikan / \sum Pengaduan Masuk) x 100% | Persen | 83.5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | | |
| IKK 6.5 | Persentase Unit Kerja dengan Maturitas Manajemen Risiko Level 3 | Jumlah Unit Kerja dengan nilai Manajemen Risiko mencapai level 3 dibagi dengan jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian Manajemen Risiko | (\sum Unit Kerja dengan Nilai Manajemen Risiko Mencapai Level 3 / \sum Unit Kerja yang Dilakukan Penilaian Manajemen Risiko) x 100% | Persen | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | |
| IKK 6.6 | Persentase Usulan Unit Kerja untuk Pembangunan Zona Integritas yang Dilakukan Penjaminan Kualitas | Jumlah Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas dibagi dengan jumlah Satker Kementerian Perhubungan yang diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/WBBM | (\sum Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas / \sum Satker Kementerian Perhubungan yang Diusulkan Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM) x 100% | Persen | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| IKK 6.7 | Persentase Pelaporan Non LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Tingkat pelaporan non LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan diperoleh dari perbandingan jumlah wajib lapor non LHKPN yang telah melaporkan tepat waktu melalui Aplikasi Simpanan Berharga dengan jumlah total wajib lapor non LHKPN Kementerian Perhubungan | (\sum Wajib Lapor Non LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga / \sum Wajib Lapor Non LHKPN Kementerian Perhubungan) x 100% | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| IKK 6.8 | Persentase Fasilitas Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan | Tingkat fasilitas evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari perbandingan jumlah program evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dengan total program evaluasi. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Internal terdiri atas Evaluasi <i>Ex Ante</i> dan Evaluasi <i>On Going</i> setiap Triwulan. | (\sum Program Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Dilaksanakan / \sum Program Evaluasi Reformasi Birokrasi) x 100% | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| IKK 6.9 | Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti | Jumlah temuan ditindaklanjuti (status tuntas+proses+TDTL) dibagi dengan jumlah temuan. Komponen perhitungan adalah kompilasi dari semua jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. | Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti / Jumlah Temuan x 100% Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti = Temuan Status Tuntas + Temuan Status Proses+ Temuan Status TDTL | Persen | 99.16 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | | |
| IKK 6.10 | Persentase Tindak Lanjut LHP BPK yang Sesuai Rekomendasi | Persentase LHP BPK yang ditindaklanjuti diperoleh dari Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Status "Sesuai Rekomendasi" berdasarkan Berita Acara Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK RI dibagi dengan jumlah rekomendasi | (\sum Rekomendasi dengan Status "Sesuai Rekomendasi" / \sum Rekomendasi) x 100% | Persen | 86.44 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.25 | 87.5 | | |
| IKK 6.11 | Persentase Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Pendampingan Stranas PK | Persentase <i>monitoring</i> dan pendampingan Stranas PK diperoleh dari jumlah pelaporan aksi Stranas PK dibanding dengan laporan triwulanan dan pelaksanaan uji petik Stranas PK dibanding rencana pelaksanaan uji petik Stranas PK | (\sum Pelaporan Aksi Stranas PK / 4) x 50% + (\sum Pelaksanaan Uji Petik / 4) x 50% | Persen | - | 75 | 75 | 87.50 | 87.50 | 100 | | |
| IKK 6.12 | Persentase Pengisian Survei Penilaian Integritas oleh Responden | Persentase respon responden Survei Penilaian Integritas diperoleh dari perolehan total respon dibanding dengan jumlah data <i>blast</i> yang dikirim KPK | (\sum Perolehan Respon / \sum Data <i>Blast</i> Terkirim) x 100% | Persen | 38.84 | 38.85 | 39 | 39.20 | 39.50 | 40 | | |
| SK 7 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan | IKK 7.1 | Skor Penilaian Mandiri Dukungan Pengawasan IACM | Skor Penilaian Mandiri Komponen Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP diperoleh dari penjumlahan skor elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Komponen Dukungan Pengawasan terdiri dari: - Elemen Pengelolaan SDM (Bagian SDMOT) - Elemen Praktik Profesional (Bagian Perencanaan dan Evaluasi) - Elemen Akuntabilitas & Manajemen Kinerja (Bagian Keuangan dan Umum) - Elemen Budaya & Hubungan Organisasi (Bagian PHPHH) - Elemen Struktur Tata Kelola (Bagian PHPHH) | (\sum Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan / 60%) | Skor | 3.6583 | 3.69 | 3.75 | 3.78 | 3.85 | 4 |
| | | IKK 7.2 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan | Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tingkat II | Nilai | 85.22 | 85.50 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.50 |
| | | IKK 7.3 | Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit | Hasil Penilaian Mandiri Indeks Sistem Merit Inspektorat Jenderal yang dinilai berdasarkan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Aspek Penilaian Sistem Merit, antara lain: - Perencanaan - Pengadaan - Pengembangan Karir - Mutasi, Rotasi, dan Promosi - Manajemen Kinerja - Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin - Pertindungan dan Pelayanan - Sistem Informasi | (\sum Nilai Aspek Penilaian Sistem Merit) | Nilai | - | 290 | 300 | 325 | 330 | 350 |
| | | IKK 7.4 | Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Inspektorat Jenderal | Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal diperoleh dari perbandingan jumlah wajib lapor LHKPN yang telah melaporkan tepat waktu melalui Aplikasi e-LHKPN dengan jumlah total wajib lapor LHKPN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan | (\sum Wajib Lapor LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga / \sum Wajib Lapor LHKPN Inspektorat Jenderal) x 100% | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | META INDIKATOR | RUMUSAN PERHITUNGAN | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|--|--|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | IKK 7.5 | Indeks Profesionalitas ASN | Hasil Penilaian Mandiri Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri dari: a. Kualifikasi (25%) b. Kompetensi (40%) c. Kinerja (30%) d. Disiplin (5%) | \sum Nilai Dimensi Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | - | 84.44 | 84.94 | 85.55 | 86.46 | 87.40 |
| | IKK 7.6 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Dihitung dari penjumlahan: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (15%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Capaian Output (25%) | \sum ((Nilai Indikator n x Bobot Indikator n) x Konversi Bobot) – Nilai Indikator Dispensasi SPM | Nilai | 99.88 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| | IKK 7.7 | Nilai Indeks Pengelolaan Aset | Dihitung dari penjumlahan: 1. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L (0,20) 2. Realisasi PNPB dari pengelolaan BMN (0,60) 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (0,4) 4. Asuransi BMN (0,60) 5. Tindak lanjut pengelolaan BMN (0,60) 6. Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (0,60) 7. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (0,60) 8. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (0,40) | \sum Nilai Indeks Pengelolaan Aset Nilai Indeks Pengelolaan Aset = Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L x 0,2 + Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN x 0,6 + Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN x 0,4 + Asuransi BMN x 0,6 + Tindak Lanjut Pengelolaan BMN x 0,6 + Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN x 0,6 + Persentase BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan x 0,6 + Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan x 0,4 | Nilai | 3.98 | 3.52 | 3.56 | 3.60 | 3.64 | 3.68 |
| | IKK 7.8 | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) NKPA = Capaian RO x 75% + Penggunaan SBK x 10% + Efisiensi SBK x 15% Capaian RO = Capaian RO/(RVRO/TVRO) Menghitung tingkat efisiensi pada RO SBK dengan formula sebagai berikut: Indeks dalam PMK SBK > Penyerapan Anggaran di RO/Realisasi Volume RO • Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%. • Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%. • Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%. | Capaian RO x 75% + Penggunaan SBK x 10% + Efisiensi SBK x 15% | Nilai | 90.88 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| | IKK 7.9 | Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal | Komposit Indikator: 1. Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dikeluarkan oleh tim evaluator APJP 2. Tindak lanjut terhadap Aol SPIIP yang telah dikeluarkan oleh BPKP dan telah dipetakan penindaklanjutnya oleh Biro Perencanaan 3. Level Maturitas MR Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil penilaian maturitas yang telah dilakukan oleh APJP 4. Realisasi pelaksanaan PKPT dibandingkan dengan unit kerja yang tercantum dalam dokumen kerja rencana pengawasan tahunan (PKPT) | Nilai SAKIP x 25 + Nilai TL Aol SPIIP x 25 + Maturitas MR x 25 + Realisasi PKPT x 25 Nilai SAKIP = Nilai Evaluasi SAKIP I/II / Nilai Maksimal SAKIP Nilai TL Aol SPIIP = \sum Aol yang Ditindaklanjuti / \sum Aol Maturitas MR = Level Maturitas MR I/II / Level Maksimal Maturitas MR Realisasi PKPT = \sum Unit Kerja yang Diaudit / \sum Unit Kerja yang Direncanakan | Nilai | - | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| | IKK 7.10 | Persentase Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan | Persentase pemeliharaan atas item kebutuhan pemeliharaan berdasarkan hasil evaluasi atau identifikasi TIK. Item pemeliharaan hasil evaluasi adalah kumpulan kebutuhan perbaikan yang diperoleh dari hasil evaluasi sistem. | \sum Realisasi Pemeliharaan Sistem / \sum Item Kebutuhan Pemeliharaan Hasil Evaluasi atau Identifikasi TIK x 100% | Persen | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | IKK 7.11 | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan | Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase proses Audit Kinerja menggunakan Aplikasi Siau dan persentase proses Reviu menggunakan Aplikasi Siau. | (Persentase Audit Menggunakan Siau + Persentasi Reviu Menggunakan Siau) / 2 Persentase Audit Menggunakan Siau = \sum Realisasi Audit Kinerja Menggunakan Siau / \sum ST Audit Kinerja x 100% Persentase Reviu Menggunakan Siau = \sum Realisasi Reviu menggunakan Siau / \sum ST Reviu x 100% Kegiatan Reviu terbatas pada: 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Reviu RKBMN 4. Reviu HPS 5. Reviu Revisi DIPA | Persen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | IKK 7.12 | Persentase Kerjasama yang Dilaksanakan | Persentase kerja sama yang dilaksanakan diperoleh dari jumlah kesepakatan bersama/ perjanjian kerja sama yang dilakukan dibandingkan dengan dengan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama | \sum Kerja Sama yang Dilakukan / \sum Rencana Kerja sama x 100% | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | IKK 7.13 | Persentase Pedoman Pengawasan yang Ditetapkan | Persentase pedoman pengawasan yang ditetapkan diperoleh dari jumlah pedoman/peraturan prioritas yang ditetapkan dibandingkan dengan rencana penetapan pedoman/peraturan prioritas dari usulan produk hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal | \sum Pedoman Prioritas yang Ditetapkan / \sum Program Penetapan Pedoman Prioritas x 100% | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | IKK 7.14 | Persentase Pemahaman Publik Positif terhadap Komunikasi | Elemen yang menjadi penghitungan dalam pengukuran indikator ini | \sum Konten Sosial Media dengan Pemahaman Publik Positif/ \sum Konten | Persen | 94.149 | 94.20 | 94.30 | 94.40 | 94.50 | 94.60 |

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | META INDIKATOR | RUMUSAN PERHITUNGAN | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Publik Inspektorat Jenderal | <p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Media Sosial Inspektorat Jenderal Buletin Transparansi PPID <p>Parameter konten dengan pemahaman publik positif, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Konten yang mengulas seputar informasi kebijakan, kinerja, prestasi/penghargaan, capaian, pelaksanaan tugas-tugas, kegiatan teknis Inspektorat Jenderal; Pihak-pihak yang direplikasi diantaranya figur internal Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal; Segala sesuatu yang menciptakan dan meningkatkan citra/reputasi Positif bagi Inspektorat Jenderal. <p>Parameter konten dengan pemahaman publik netral, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberitaan mencakup informasi kebijakan, prestasi/penghargaan, capaian, pelaksanaan tugas-tugas, kinerja dan kegiatan teknis Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Stakeholders (operator dan mitra kerja), yang menimbulkan pro/kontra (polemik) dari berbagai kalangan; Isu-isu yang muncul sebagai dampak dari kebijakan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal dan Sektor Transportasi. <p>Parameter konten dengan pemahaman publik negatif, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kalimat yang digunakan membingungkan dan menimbulkan banyak persepsi bagi pembacanya; Bersifat provokatif, mengandung adu domba, menghasut, memunculkan konflik suku, agama, ras, golongan, dan ujaran kebencian; Pemberitaan yang hanya fokus menyebarkan poin kritikan terhadap kebijakan, prestasi/penghargaan, capaian, pelaksanaan tugas-tugas kegiatan teknis dan kinerja Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal. | Sosial Media x 100% | | | | | | | |
| | IKK 7.15 Kualitas Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan | <p>Indikator untuk mengukur kualitas survei menggunakan beberapa parameter, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desain Survei (DS) : Mengukur sejauh mana pertanyaan survei jelas dan relevan. - Tingkat Respons (TR) : Mengukur jumlah responden yang memberikan respons dibandingkan dengan target survei. - Ketepatan Waktu (KW) : Mengukur apakah survei diselesaikan sesuai dengan jadwal. | $(DS+TR+KW) / 3$ Desain Survei (DS) = $\frac{\sum \text{Pertanyaan Relevan}}{\sum \text{Pertanyaan}} \times 100\%$ Tingkat Respons (TR) = $\frac{\sum \text{Responden yang Mengisi Kuisisioner}}{\sum \text{Target Responden}} \times 100\%$ Ketepatan Waktu (KW) = $\frac{\sum \text{Responden Tepat Waktu}}{(\sum \text{Responden yang Mengisi Kuisisioner})} \times 100\%$ Predikat Kualitas: 81-100% = Sangat Baik 61-80% = Baik 41-60% = Cukup 21-40% = Kurang 0-20% = Sangat Kurang | Kualitas | - | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |

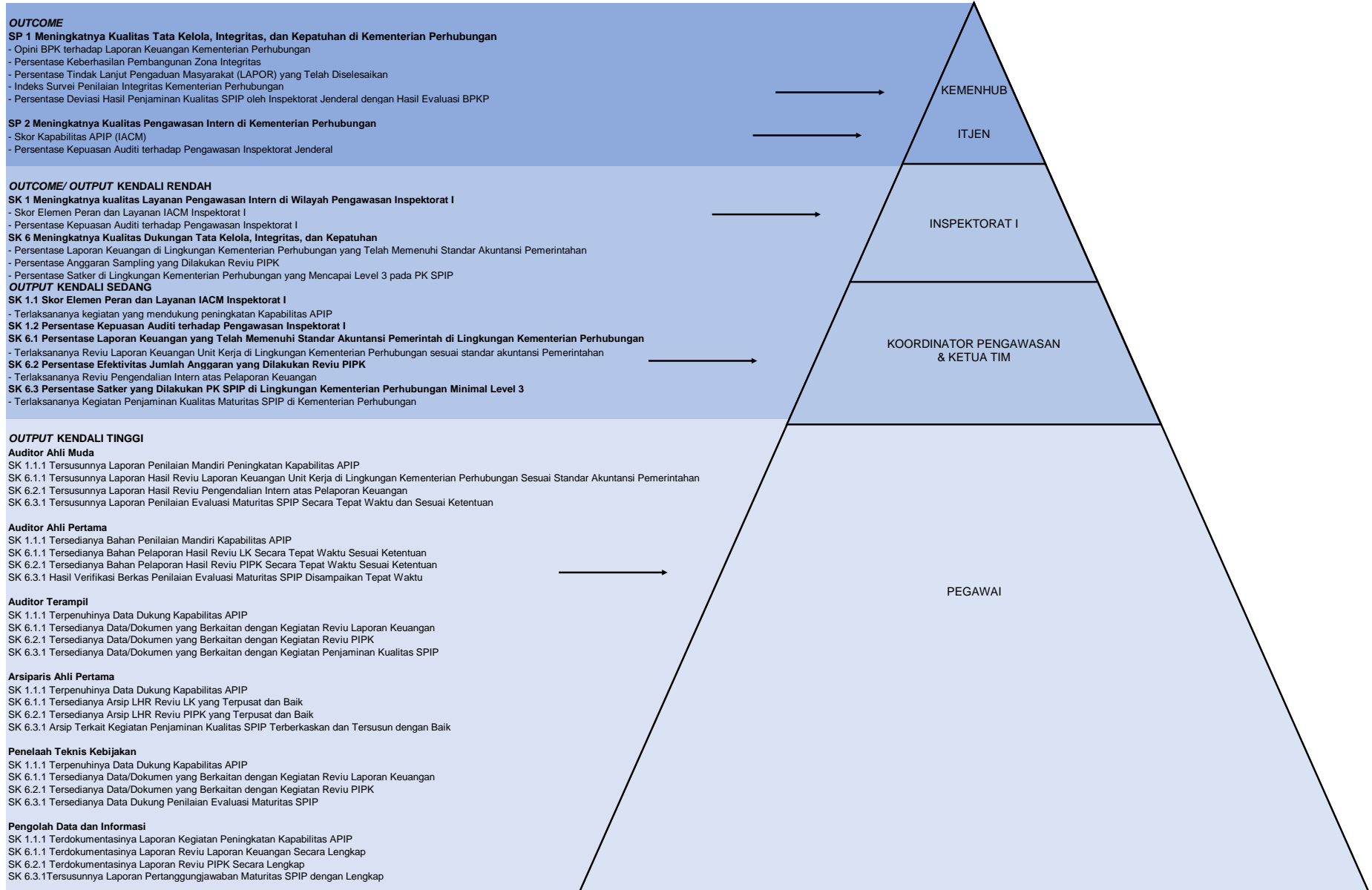
F. POHON KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029



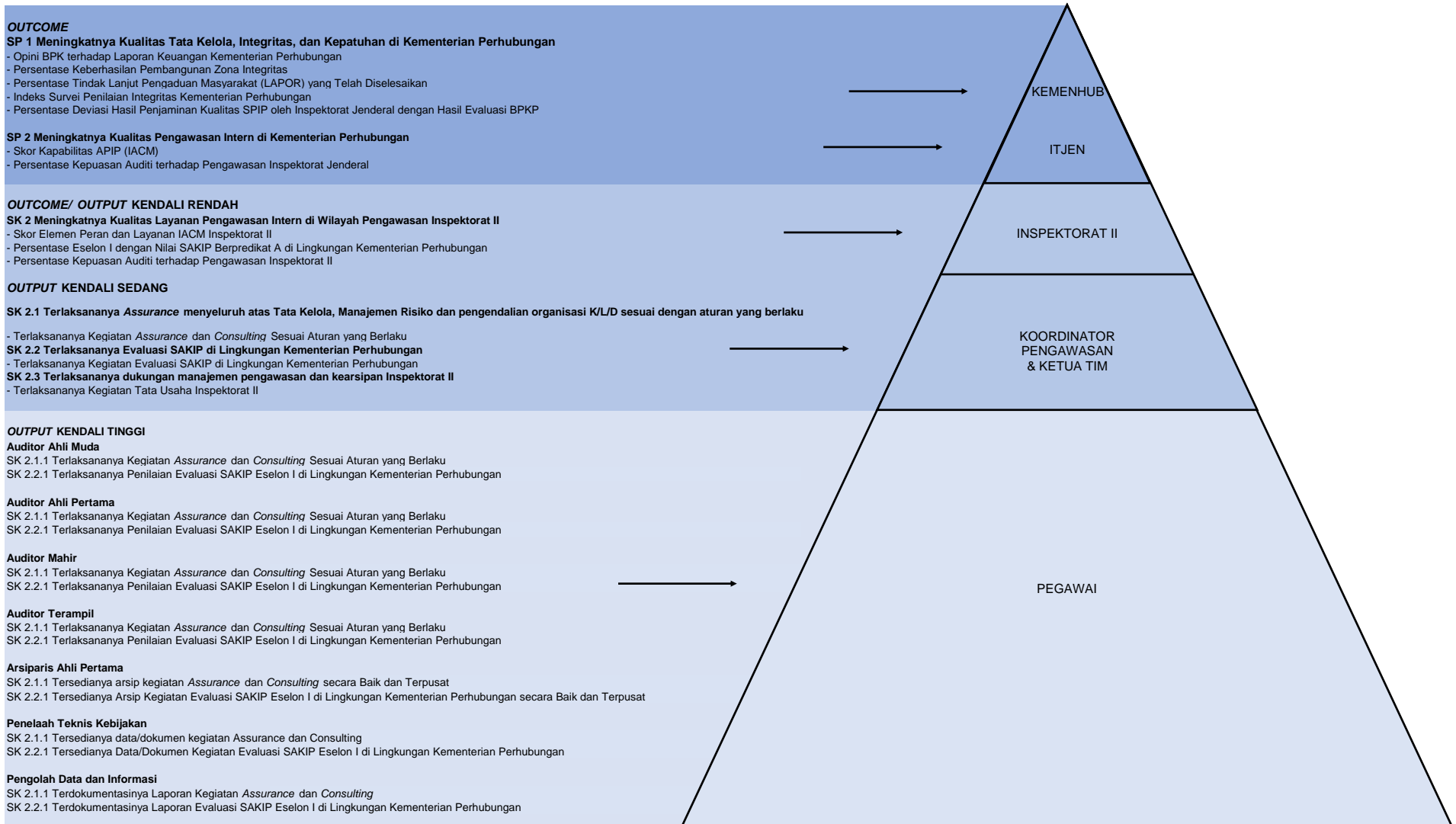
**G. MATRIK PERAN BAGI HASIL ANTAR UNIT
INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029**

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK | | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| SP 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan | IKP 1.1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan | Inspektorat I |
| | | IKP 1.2 | Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | Inspektorat Investigasi |
| | | IKP 1.3 | Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Telah Diselesaikan | Inspektorat Investigasi |
| | | IKP 1.4 | Indeks Survei Penilaian Integritas Kementerian Perhubungan | Bagian PHPHH |
| | | IKP 1.5 | Persentase Deviasi Hasil Penjaminan Kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dengan Hasil Evaluasi BPKP | Inspektorat I |
| SP 2 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan | IKP 2.1 | Skor Kapabilitas APIP (IACM) | Seluruh Inspektorat dan Bagian |
| | | IKP 2.2 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Jenderal | Bagian PHPHH |
| SK 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | IKK 1.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat I | Inspektorat I |
| | | IKK 1.2 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat I | |
| SK 2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | IKK 2.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat II | Inspektorat II |
| | | IKK 2.2 | Persentase Nilai SAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan | |
| | | IKK 2.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat II | |
| SK 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | IKK 3.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat III | Inspektorat III |
| | | IKK 3.2 | Persentase Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN | |
| | | IKK 3.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat III | |
| SK 4 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | IKK 4.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat IV | Inspektorat IV |
| | | IKK 4.2 | Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA | |
| | | IKK 4.3 | Persentase Hasil <i>Peer Review</i> (Telaah Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik | |
| | | IKK 4.4 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat IV | |
| SK 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Investigasi | IKK 5.1 | Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat Investigasi | Inspektorat Investigasi |
| | | IKK 5.2 | Persentase Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti | |
| | | IKK 5.3 | Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Investigasi | |
| SK 6 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan | IKK 6.1 | Persentase Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan | Inspektorat I |
| | | IKK 6.2 | Persentase Anggaran Sampling yang Dilakukan Reviu PIPK | Inspektorat I |
| | | IKK 6.3 | Persentase Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Mencapai Level 3 pada PK SPIP | Inspektorat I |
| | | IKK 6.4 | Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan | Inspektorat Investigasi |
| | | IKK 6.5 | Persentase Unit Kerja dengan Maturitas Manajemen Risiko Level 3 | Inspektorat Investigasi |
| | | IKK 6.6 | Persentase Usulan Unit Kerja untuk Pembangunan Zona Integritas yang Dilakukan Penjaminan Kualitas | Inspektorat Investigasi |
| | | IKK 6.7 | Persentase Pelaporan Non LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Bagian SDMO |
| | | IKK 6.8 | Persentase Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan | Bagian SDMO |
| | | IKK 6.9 | Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti | Bagian PHPHH |
| | | IKK 6.10 | Persentase Tindak Lanjut LHP BPK yang Sesuai Rekomendasi | Bagian PHPHH |
| | | IKK 6.11 | Persentase Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Pendampingan Stranas PK | Bagian PHPHH |
| | | IKK 6.12 | Persentase Pengisian Survei Penilaian Integritas oleh Responden | Bagian PHPHH |
| SK 7 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan | IKK 7.1 | Skor Penilaian Mandiri Dukungan Pengawasan IACM | Bagian SDMO |
| | | IKK 7.2 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal | Bagian SDMO |
| | | IKK 7.3 | Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit | Bagian SDMO |
| | | IKK 7.4 | Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu di Lingkungan Inspektorat Jenderal | Bagian SDMO |
| | | IKK 7.5 | Indeks Profesionalitas ASN | Bagian SDMO |
| | | IKK 7.6 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Bagian Keuangan dan Umum |
| | | IKK 7.7 | Nilai Indeks Pengelolaan Aset | Bagian Keuangan dan Umum |
| | | IKK 7.8 | Nilai Kinerja Anggaran | Bagian Perencanaan dan Evaluasi |
| | | IKK 7.9 | Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal | Bagian Perencanaan dan Evaluasi |
| | | IKK 7.10 | Persentase Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan | Bagian Perencanaan dan Evaluasi |
| | | IKK 7.11 | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan | Bagian Perencanaan dan Evaluasi |
| | | IKK 7.12 | Persentase Kerjasama yang Dilaksanakan | Bagian PHPHH |
| | | IKK 7.13 | Persentase Pedoman Pengawasan yang Ditetapkan | Bagian PHPHH |
| | | IKK 7.14 | Persentase Pemahaman Publik Positif terhadap Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal | Bagian PHPHH |
| | | IKK 7.15 | Kualitas Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan | Bagian PHPHH |

H. PIRAMIDA KINERJA INSPEKTORAT I 2025-2029



PIRAMIDA KINERJA INSPEKTORAT II 2025-2029



PIRAMIDA KINERJA INSPEKTORAT III 2025-2029

OUTCOME

SP 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
- Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
- Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Telah Diselesaikan
- Indeks Survei Penilaian Integritas Kementerian Perhubungan
- Persentase Deviasi Hasil Penjaminan Kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dengan Hasil Evaluasi BPKP

SP 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan

- Skor Kapabilitas APIP (IACM)
- Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Jenderal

OUTCOME/ OUTPUT KENDALI RENDAH

SK 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

- Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat III
- Persentase Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMMN
- Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat III

OUTPUT KENDALI SEDANG

SK 3.1 Terwujudnya Kegiatan Assurance di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- Tersusunnya Laporan Hasil AREP sesuai NSPK

SK 3.2 Terwujudnya Kegiatan Consulting di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- Tersusunnya Laporan Hasil Consulting sesuai NSPK

SK 3.3 Terlaksananya Dukungan Manajemen Pengawasan dan Kearsipan Inspektorat III

- Terlaksananya Kegiatan Tata Usaha Inspektorat III

OUTPUT KENDALI TINGGI

Auditor Ahli Muda

- SK 3.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Audit yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.2 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.3 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi yang Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.4 Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.2.1 Terlaksananya Penanganan Konsultasi
- SK 3.3.6 Pengembangan Kompetensi yang Diterbitkan oleh Lembaga Resmi

Auditor Ahli Pertama

- SK 3.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Audit yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.2 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.3 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi yang Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.4 Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan yang Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.2.1 Terlaksananya Penanganan Konsultasi
- SK 3.3.6 Pengembangan Kompetensi yang Diterbitkan oleh Lembaga Resmi

Auditor Terampil

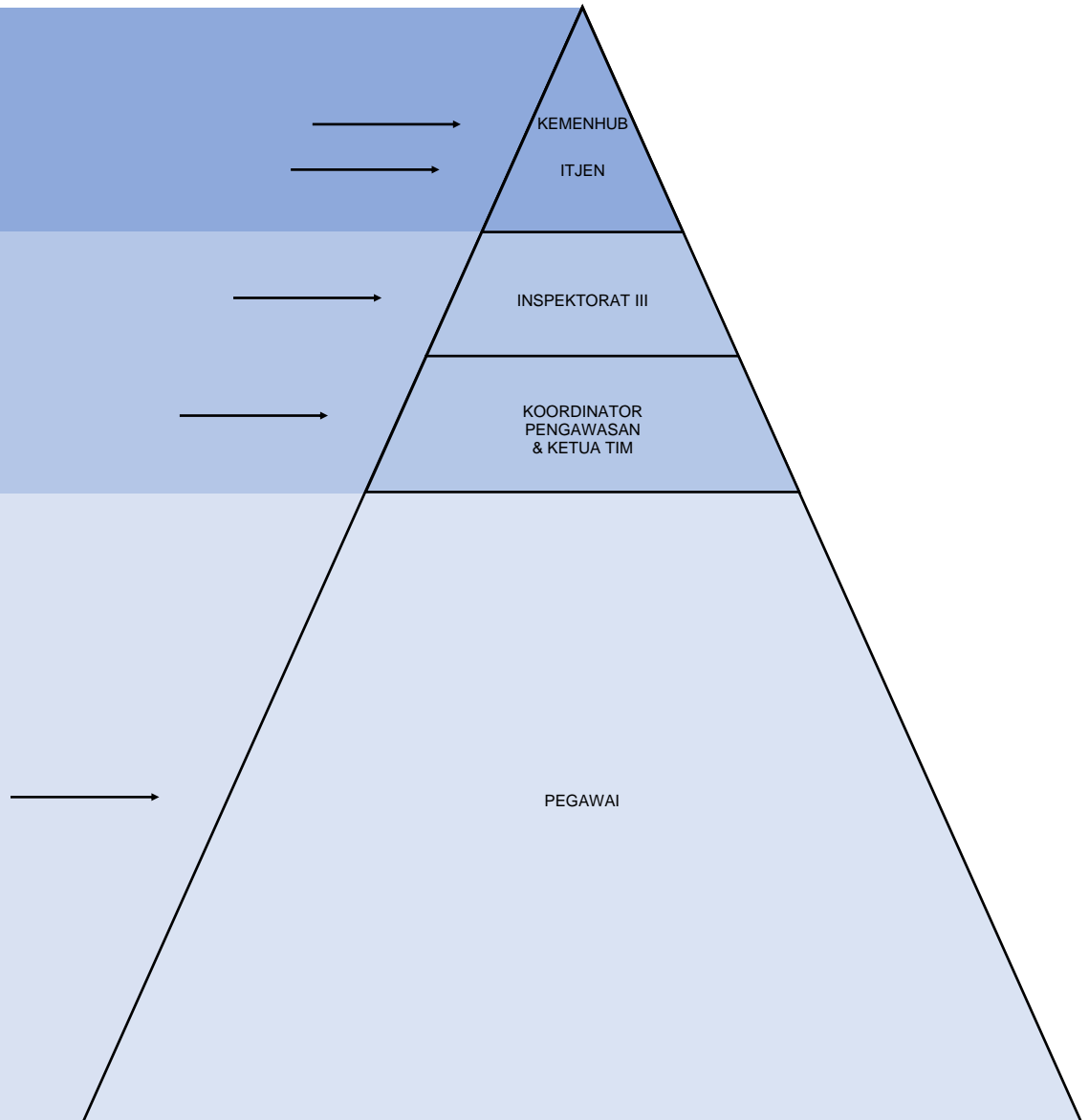
- SK 3.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Audit yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.2 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.3 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.1.4 Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 3.2.1 Terlaksananya Penanganan Konsultasi
- SK 3.3.6 Pengembangan Kompetensi yang Diterbitkan oleh Lembaga Resmi

Arsiparis Ahli Pertama

- SK 3.3.1 Terlaksananya Pengolaan Arsip Inspektorat III
- SK 3.3.6 Pengembangan Kompetensi yang Diterbitkan oleh Lembaga Resmi

Penelaah Teknis Kebijakan

- SK 3.3.2 Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Inspektorat III
- SK 3.3.3 Tersusunnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Inspektorat III
- SK 3.3.4 Tersusunnya Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat III
- SK 3.3.5 Jumlah Laporan Pelaksanaan PKS dan Bimtek Mandiri terkait Assurance & Consulting yang Telah Terlaksana
- SK 3.3.6 Pengembangan Kompetensi yang Diterbitkan oleh Lembaga Resmi



PIRAMIDA KINERJA INSPEKTORAT IV 2025-2029

OUTCOME

SP 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
- Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
- Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Telah Diselesaikan
- Indeks Survei Penilaian Integritas Kementerian Perhubungan
- Persentase Deviasi Hasil Penjaminan Kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dengan Hasil Evaluasi BPKP

SP 2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan

- Skor Kapabilitas APIP (IACM)
- Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat Jenderal

OUTCOME/ OUTPUT KENDALI RENDAH

SK 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Pengawasan Intern di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

1. Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektorat IV
2. Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA
3. Persentase Hasil *Peer Review* (Telaah Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik
4. Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektorat IV

OUTPUT KENDALI SEDANG

SK 4.1 Terwujudnya Kegiatan *Assurance* dan *Consulting* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal

- Tersusunnya Laporan Hasil *Assurance* dan *Consulting* yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku

SK 4.2 Terlaksananya Kegiatan Telaah Sejawat Internal

- Terlaksananya Kegiatan Telaah Sejawat Internal dengan Kategori Baik

SK 4.3 Terlaksananya Dukungan Manajemen Pengawasan dan Kearsipan Inspektorat IV

- Terlaksananya Kegiatan Tata Usaha Inspektorat IV

SK 4.4 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat IV

- Pengembangan Kompetensi yang Dilaksanakan

OUTPUT KENDALI TINGGI

Auditor Ahli Muda/Madya

- SK 4.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Audit yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.2 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.3 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.4 Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.5 Terlaksananya Penanganan Konsultansi
- SK 4.2.1 Terlaksananya Kegiatan Telaah Sejawat Internal
- SK 4.4.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat IV

Auditor Ahli Pertama

- SK 4.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Audit yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.2 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.3 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.4 Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.5 Terlaksananya Penanganan Konsultansi
- SK 4.2.1 Terlaksananya Kegiatan Telaah Sejawat Internal
- SK 4.4.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat IV

Auditor Terampil

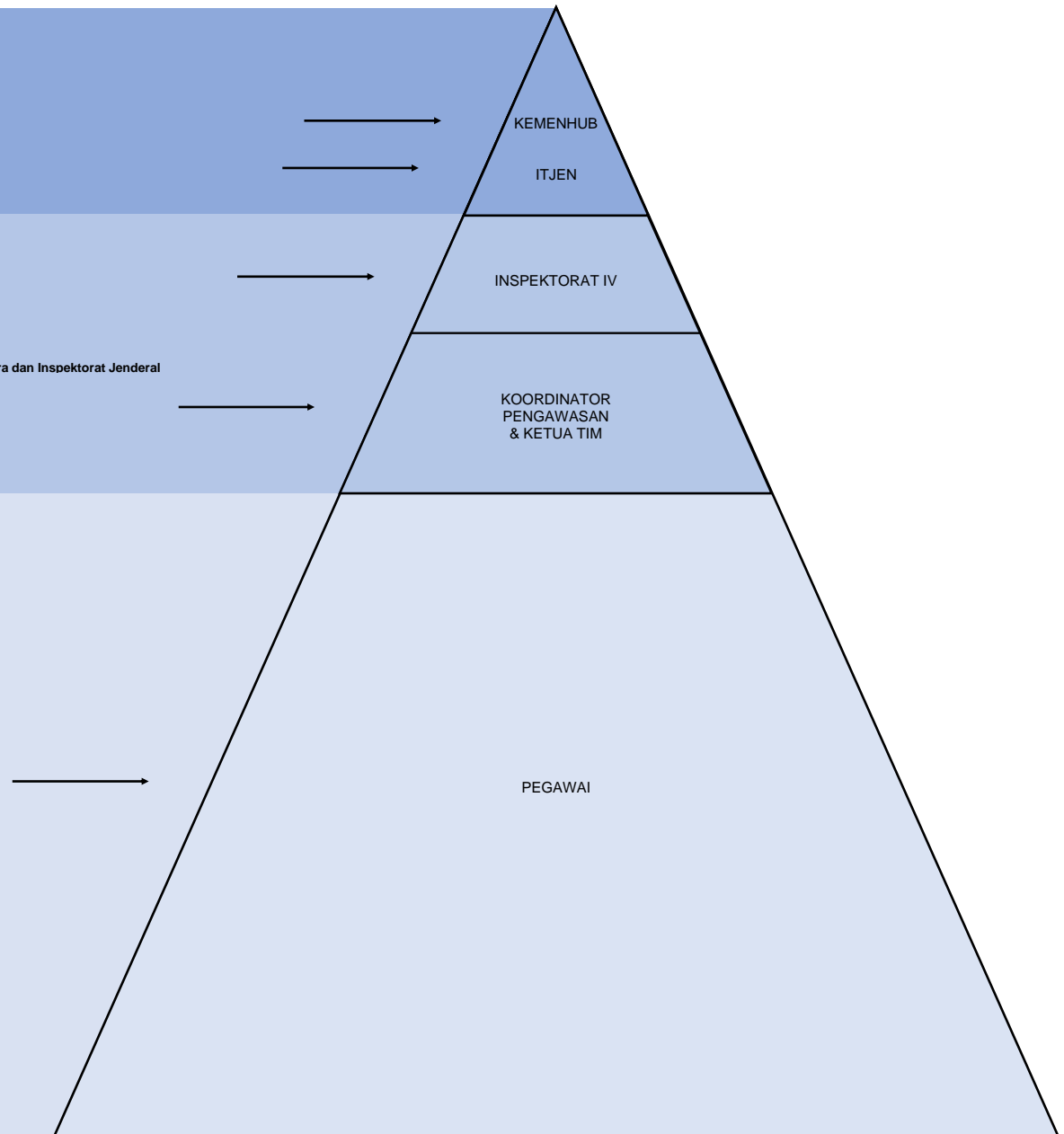
- SK 4.1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Audit yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.2 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.3 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.4 Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan yang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
- SK 4.1.5 Terlaksananya Penanganan Konsultansi
- SK 4.2.1 Terlaksananya Kegiatan Telaah Sejawat Internal
- SK 4.4.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat IV

Arsiparis Ahli Pertama

- SK 4.3.1 Terlaksananya Pengelolaan Arsip Inspektorat IV
- SK 4.3.3 Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat IV
- SK 4.4.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat IV

Penelaah Teknis Kebijakan

- SK 4.3.2 Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Inspektorat IV
- SK 4.3.3 Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat IV
- SK 4.3.4 Tersusunnya Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
- SK 4.4.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat IV



PIRAMIDA KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI 2025-2029

OUTCOME

SP 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
- Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
- Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Telah Diselesaikan
- Indeks Survei Penilaian Integritas Kementerian Perhubungan
- Persentase Deviasi Hasil Penjaminan Kualitas SPIP oleh Inspektoral Jenderal dengan Hasil Evaluasi BPKP

SP 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan

- Skor Kapabilitas APIP (IACM)
- Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektoral Jenderal

OUTCOME/ OUTPUT KENDALI RENDAH

SK 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern Inspektoral Investigasi

- Skor Elemen Peran dan Layanan IACM Inspektoral Investigasi
- Persentase Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti
- Persentase Kepuasan Auditi terhadap Pengawasan Inspektoral Investigasi

SK 6 Meningkatnya Kualitas Dukungan Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan

- Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan
- Persentase Unit Kerja dengan Maturitas Manajemen Risiko Level 3
- Persentase Usulan Unit Kerja untuk Pembangunan Zona Integritas yang Dilakukan Penjaminan Kualitas

OUTPUT KENDALI SEDANG

Koordinator Pengawasan I-V

SK 5.1 Terlaksananya Komponen Aktivitas Pengawasan pada Elemen Peran dan Layanan

SK 5.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan ADTT Penanganan Pengaduan

SK 5.5 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

SK 6.1 Terlaksananya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat

SK 6.2 Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan

SK 6.3 Terlaksananya Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan

SK 6.4 Terlaksananya Penjaminan Kualitas Pembangunan Zona Integritas

Ketua Tim Kerja Tata Usaha

SK 5.2 Terlaksananya Dukungan Tata Kelola Inspektoral Investigasi

SK 5.3 Terlaksananya Dukungan Manajemen Pengawasan Inspektoral Investigasi

SK 5.5 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

OUTPUT KENDALI TINGGI

Auditor Ahli Muda

SK 5.1.1 Tersusunnya Laporan Kegiatan Assurance dan/atau Konsultansi Inspektoral Investigasi

SK 5.4.1 Tersusunnya Laporan Temuan ADTT Penanganan Pengaduan yang Ditindaklanjuti

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

SK 6.1.1 Tersusunnya Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

SK 6.2.1 Tersusunnya Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan

SK 6.3.1 Tersusunnya Laporan Kegiatan Manajemen Risiko

SK 6.4.1 Terlaksananya Jasa Konsultansi Pembangunan Zona Integritas

Auditor Ahli Pertama

SK 5.1.1 Tersusunnya Laporan Kegiatan Assurance dan/atau Konsultansi Inspektoral Investigasi

SK 5.4.1 Tersusunnya Laporan Temuan ADTT Penanganan Pengaduan yang Ditindaklanjuti

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

SK 6.1.1 Tersusunnya Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

SK 6.2.1 Tersusunnya Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan

SK 6.3.1 Tersusunnya Laporan Kegiatan Manajemen Risiko

SK 6.4.1 Terlaksananya Jasa Konsultansi Pembangunan Zona Integritas

Auditor Terampil

SK 5.1.1 Tersusunnya Laporan Kegiatan Assurance dan/atau Konsultansi Inspektoral Investigasi

SK 5.4.1 Tersusunnya Laporan Temuan ADTT Penanganan Pengaduan yang Ditindaklanjuti

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

SK 6.1.1 Tersusunnya Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

SK 6.2.1 Tersusunnya Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan

SK 6.3.1 Tersusunnya Laporan Kegiatan Manajemen Risiko

SK 6.4.1 Terlaksananya Jasa Konsultansi Pembangunan Zona Integritas

Arsiparis

SK 5.2.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektoral Investigasi

SK 5.3.1 Terlaksananya Pengelolaan Arsip Inspektoral Investigasi

SK 5.3.3 Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektoral Investigasi

SK 5.3.4 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Anggaran Inspektoral Investigasi

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Auditor Kepegawaian

SK 5.2.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektoral Investigasi

SK 5.2.2 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektoral Investigasi

SK 5.3.6 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Inspektoral Investigasi

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Penelaah Teknis Kebijakan

SK 5.2.2 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektoral Investigasi

SK 5.3.3 Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektoral Investigasi

SK 5.3.5 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Rumah Tangga Inspektoral Investigasi

SK 5.3.7 Tersusunnya Dokumen Hukum dan Tindak Lanjut Inspektoral Investigasi

SK 5.3.8 Tersusunnya Dokumen Pengawasan Inspektoral Investigasi

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pengolah Data dan Informasi

SK 5.2.2 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektoral Investigasi

SK 5.3.2 Terlaksananya Pengelolaan Tata Naskah Dinas Inspektoral Investigasi

SK 5.3.5 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Rumah Tangga Inspektoral Investigasi

SK 5.3.8 Tersusunnya Dokumen Pengawasan Inspektoral Investigasi

SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

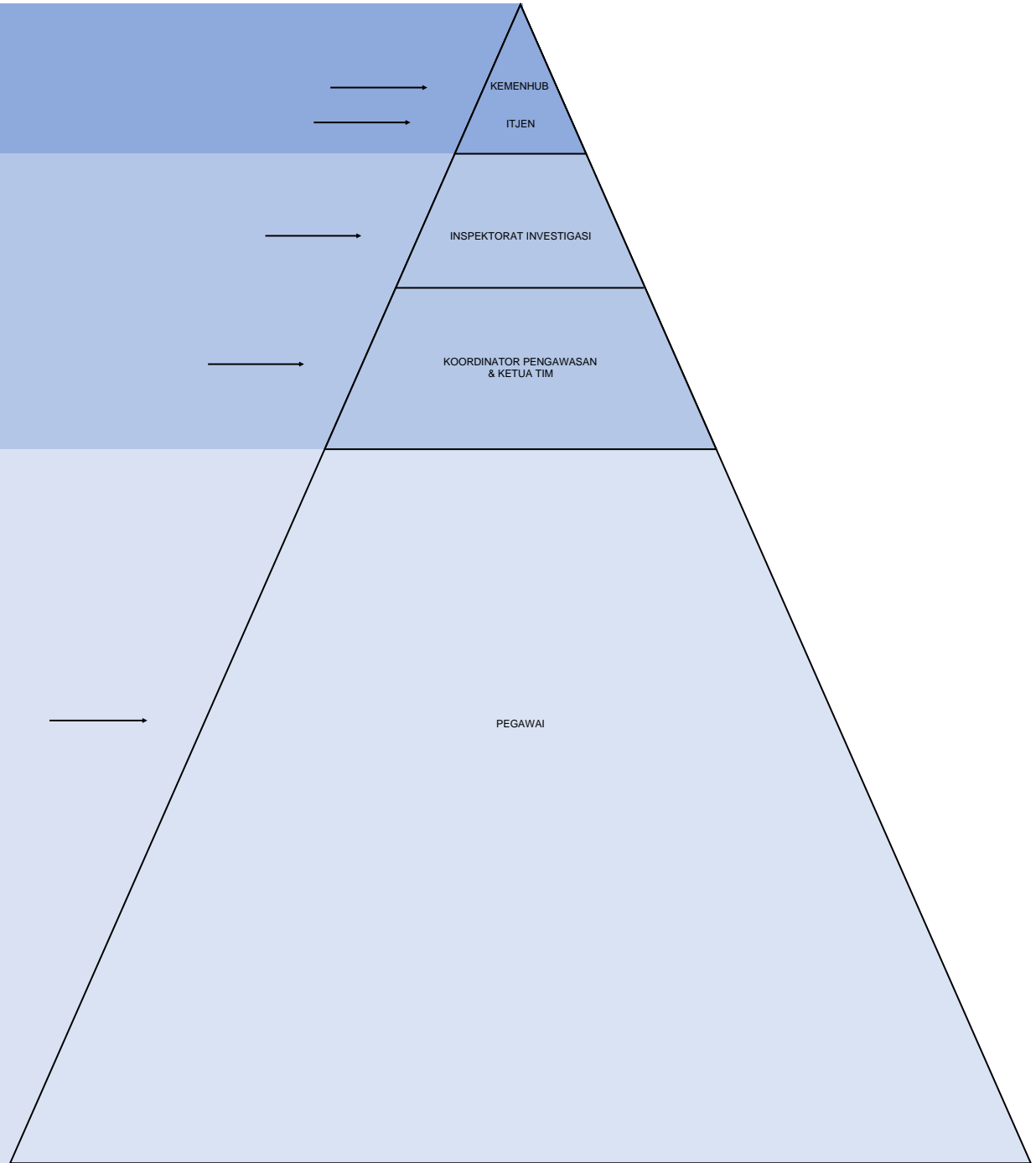
Penata Layanan Operasional

SK 5.3.3 Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektoral Investigasi

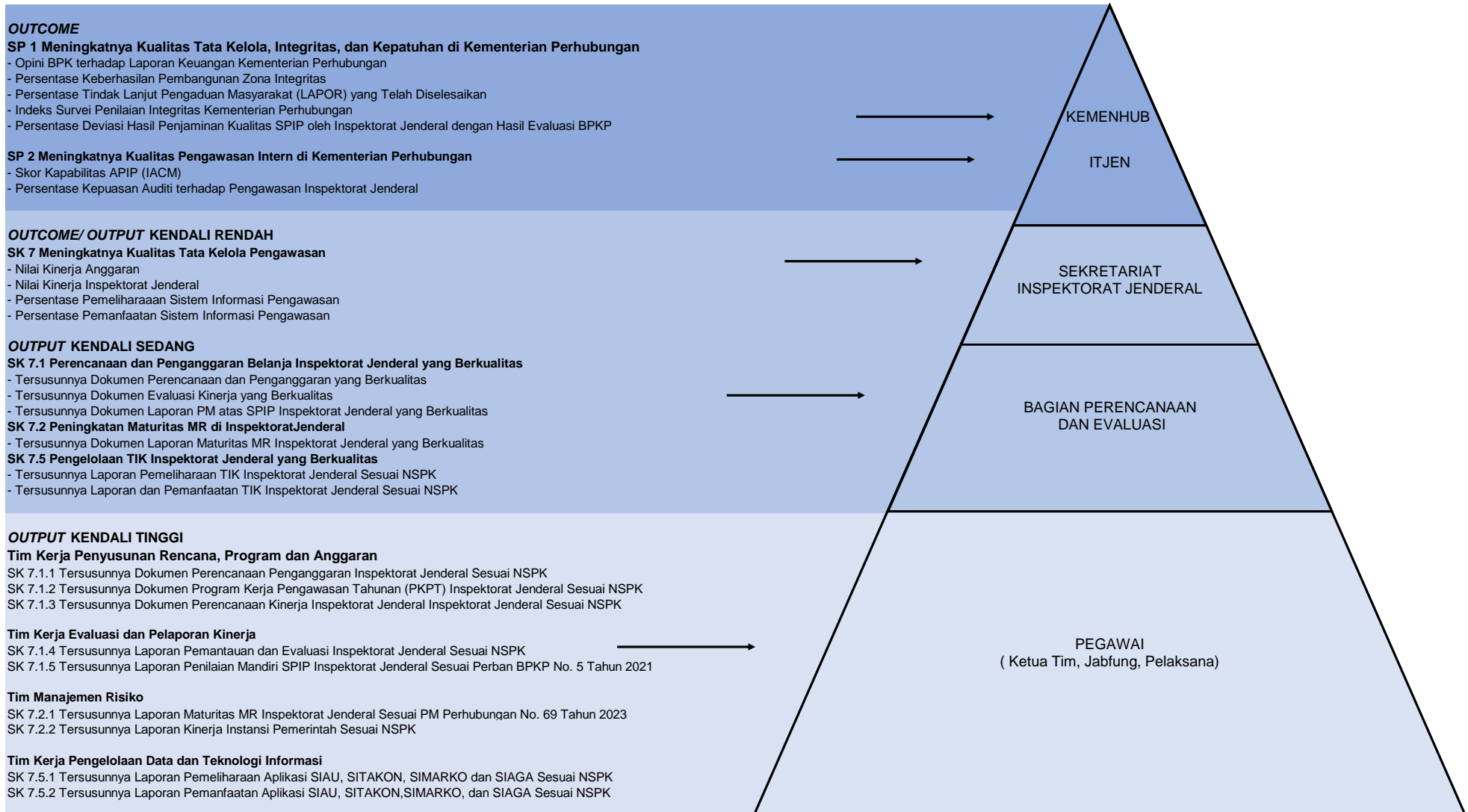
SK 5.3.4 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Anggaran Inspektoral Investigasi

SK 5.3.8 Tersusunnya Dokumen Pengawasan Inspektoral Investigasi

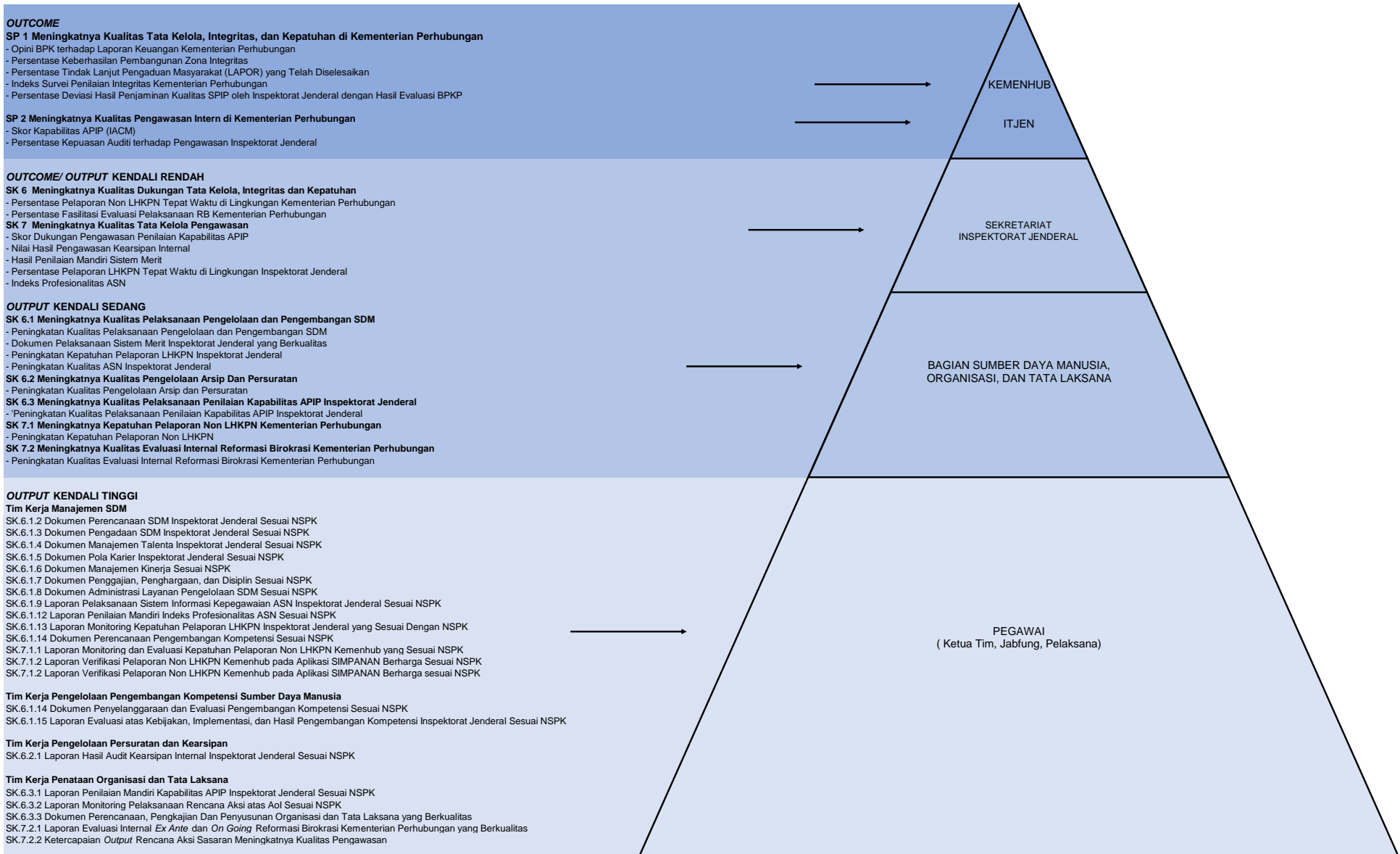
SK 5.5.1 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai



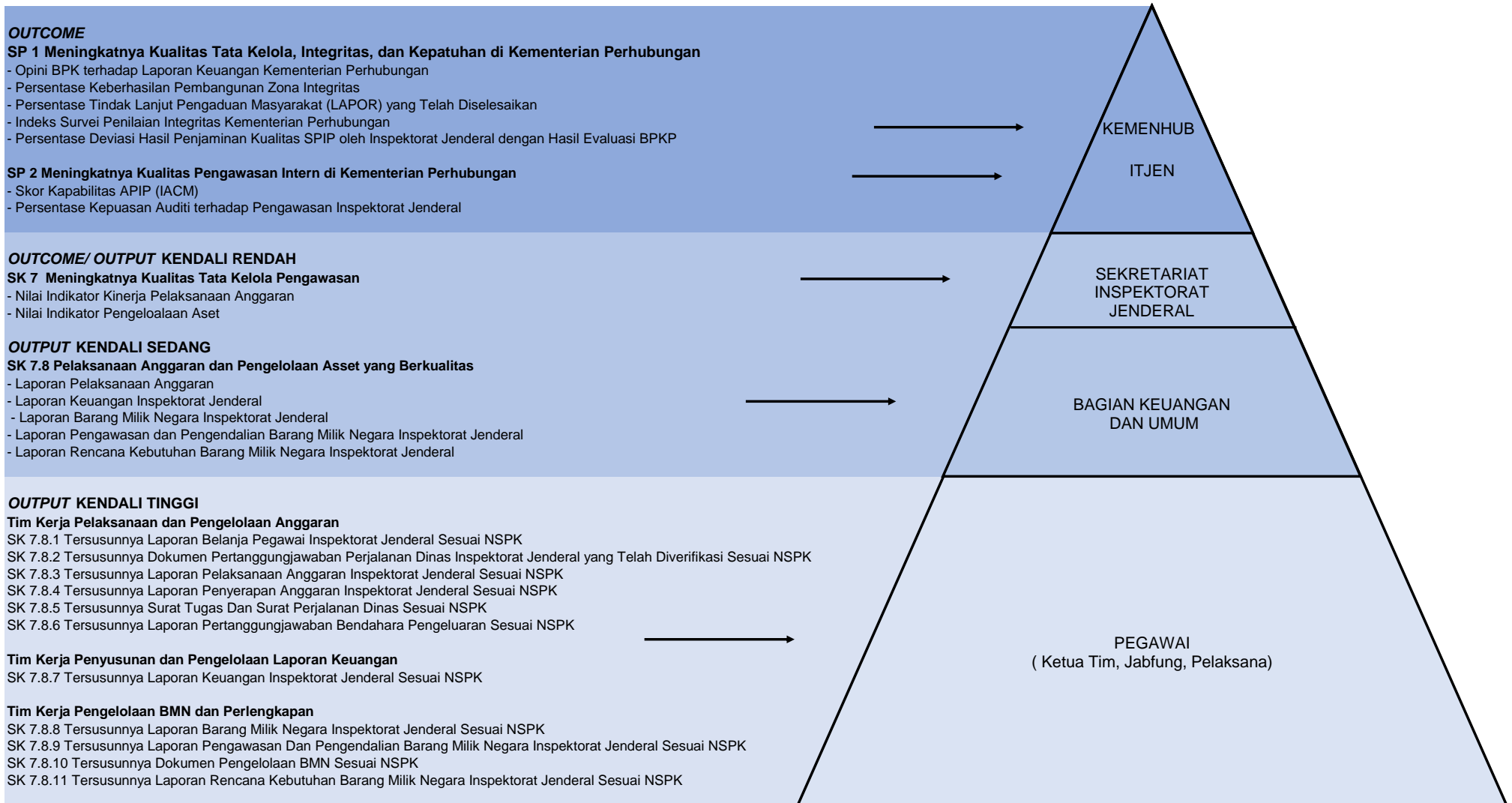
PIRAMIDA KINERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI 2025-2029



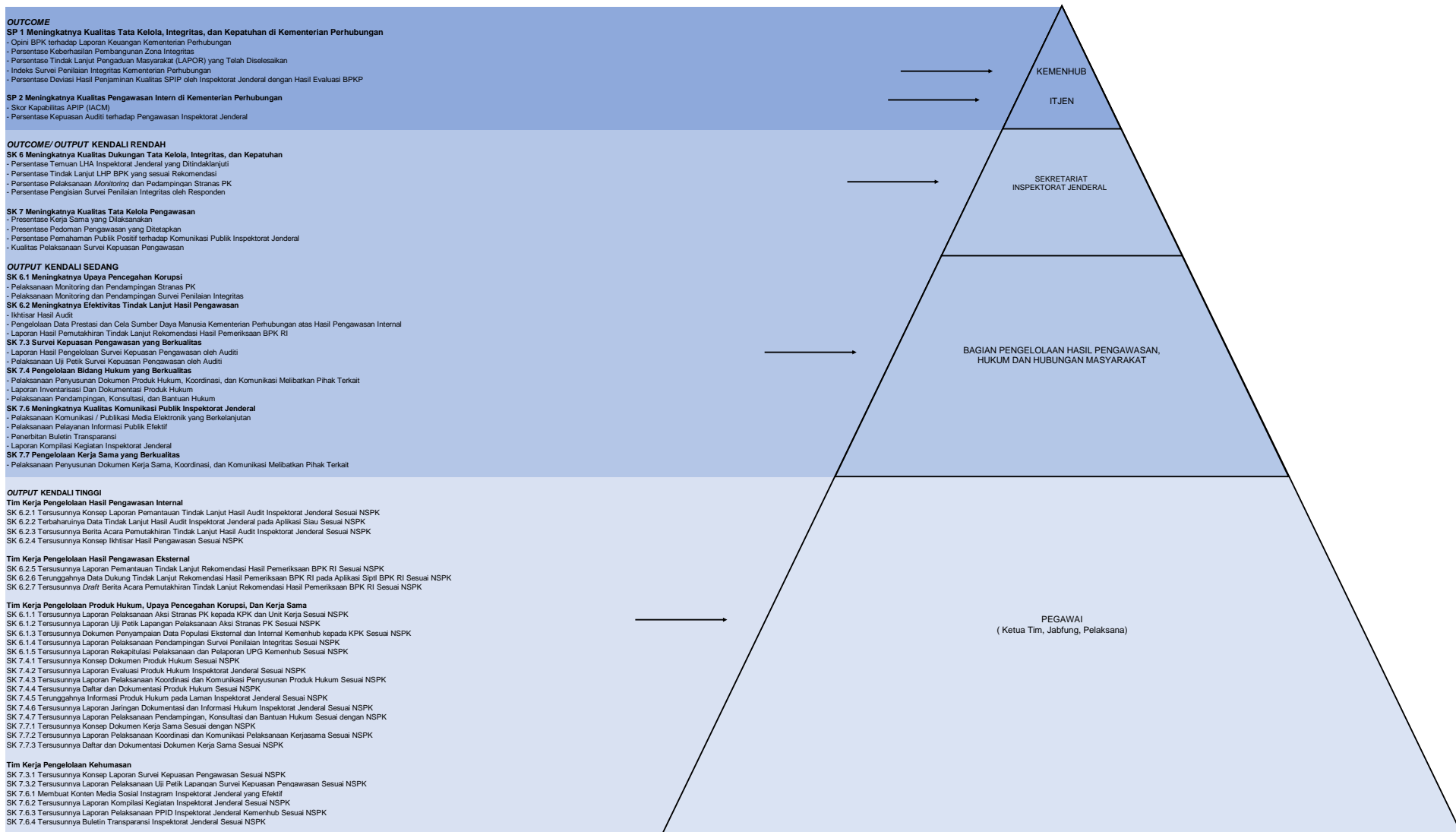
PIRAMIDA KINERJA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 2025-2029



PIRAMIDA KINERJA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM 2025-2029



PIRAMIDA KINERJABAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2025-2029



INSPEKTUR JENDERAL,

ARIF TOHA